

ABSTRAK

UPAHAN PEKERJA KELAPA SAWIT MENURUT UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Di Kampung Bukit Makmur Kabupaten Berau Kalimantan Timur 2017)

Ruchhima

33.3.2.11551

Semakin tingginya permintaan akan minyak kelapa sawit mentah maka banyak pengusaha yang tertarik untuk membuka lahan perkebunan sawit. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi tinggi untuk perkebunan sawit karena memiliki iklim yang bagus dan banyaknya pekerja yang dapat dibayar dengan murah. Banyak pekerja yang mengalami diskriminasi karena mendapatkan upah yang rendah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengupahan pekerja sawit yang berada di Kampung Bukit Makmur Kabupaten Berau yang mana beberapa pekerja masih mendapat upah di bawah standar Upah Minimum Kabupaten Berau untuk tahun 2017.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui sistem pengupahan yang diterapkan oleh setiap pemilik kebun sawit dalam mengupah pekerjanya. Sumber data primer yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan angket dari pekerja dan pemilik kebun sawit, beberapa buku yang membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pengupahan dalam Islam atau ujarah. Data sekunder didapat dari jurnal dan internet yang membahas Upah minimum yang diterapkan untuk pekerja sawit bagaimana pengupaha menurut ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua sistem pengupahan yang diterapkan pemilik kebun yaitu sistem satuan waktu secara harian atau bulanan dan sistem borongan. Dari total 25 perkebunan diambil sampel sebanyak 5 perkebunan atau 20 % dari total perkebunan, 2 perkebunan telah memberikan upah kepada pekerja mereka sesuai dengan standar Upah Minimu Kabupaten Berau 2017 dan yang lainnya belum memenuhi standar. Namun menurut ekonomi Islam pemilik telah menerapkan syarat dan rukun Ijarah seperti membuat perjanjian, menentukan upah sebelum bekerja dan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan kesepakatan kerja.

Kata kunci: Upah Minimum Kabupaten, *Ijarah*, pekerja

ABSTRACT

THE WAGE OF PALM OIL WORKERS ACCORDING TO DISTRICT MINIMUM WAGE AND ISLAMIC ECONOMY

(Case Study Bukit Makmur Village, Sub-Segah, Berau District, East Kalimantan 2017).

Ruchhima

34.3.2.1551

The increasing request of crude palm oil makes many businessman interested in opening a palm plantation. Indonesia is a country that has a high potential for oil palm plantations because it has a good climate and a large number of workers who can be paid cheaply. It results in number of workers who experience discrimination due to low wage received.

This research aims to examine oil palm workers in Bukit Makmur Village Berau district who still get their wages below the Minimum wage of District Berau standards in 2017.

In this thesis qualitative descriptive method was used to know the waging system applied by every owner of palm plantations. The primary data sources used were the forms of interview with workers and owner of palm plantations, some books of employment law and waging in Islamic or *ujrah*. The secondary data were obtained from the journal and the internet that discuss the minimum wage applied to oil workers and waging system according to the Islamic economy.

The results of this research were the two waging system applied by the palm plantations owners that was a system of units of time on a daily basis or monthly basis and wholesale system. From 25 plantations taken 5 plantations sample or 20% from total palm plantations, 8% or 2 palm plantations owners had provided wages to their workers according to the standard Minimu Wage District Berau in 2017 and the other had not met the standard. But according to Islamic Economics palm plantations owners had applied the terms of work agreement (*Ijarah*) such as to determine wages before work and gave workers rights in accordance with the agreement.

Keywords: Minimum Wage District, *Ijarah*, worker